



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

LEGALITAS E-COMMERCE PUPUK KOMPOS DESA MELUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

**Bahar Elfudllatsani^{1*}, Asep Herlan¹, Frida Nurrahma Masturi¹, Al Fiani
Nenden Iryatin¹, Zakia Rosida¹, Rafi Saputra Wibowo¹**

¹Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: bahar.elfudllatsani@unsoed.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital di sektor pertanian membuka peluang baru dalam pemasaran produk ramah lingkungan, namun juga menimbulkan tantangan terkait aspek legalitas dan keberlanjutan. Artikel ini membahas kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Melung yang difokuskan pada edukasi hukum lingkungan dan penguatan kapasitas pelaku usaha pupuk kompos dalam memanfaatkan e-commerce. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi regulasi terkait perdagangan elektronik, pelatihan perlindungan konsumen, pendampingan strategi digital marketing, serta integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam praktik bisnis. Evaluasi kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai pentingnya legalitas usaha digital, perlindungan hak konsumen, serta kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan green economy. Hasilnya, pelaku usaha mampu memahami sekaligus menerapkan praktik e-commerce yang legal, etis, dan ramah lingkungan. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi hukum lingkungan dengan strategi pemasaran digital berkelanjutan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan di tingkat desa. Dengan demikian, program ini berpotensi direplikasi sebagai model penguatan ekonomi desa berbasis teknologi dan keberlanjutan lingkungan.

Kata kunci: E-Commerce, Hukum Lingkungan, Perlindungan Konsumen, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs

ABSTRACT

Digital transformation in the agricultural sector opens new opportunities for marketing environmentally friendly products but also presents challenges related to legality and sustainability. This article discusses a community service program in Melung Village aimed at providing environmental law education and strengthening the capacity of compost fertilizer entrepreneurs in utilizing e-commerce. The program included socialization of regulations on electronic trade, consumer protection training, mentoring in digital marketing strategies, and integration of sustainable development principles into business practices. The evaluation showed improved participant knowledge regarding the importance of digital business legality, consumer rights protection, and awareness of maintaining environmental



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

sustainability through green economy practices. As a result, entrepreneurs were able to understand and apply e-commerce practices that are legal, ethical, and environmentally friendly. These findings emphasize that integrating environmental law with sustainable digital marketing strategies can serve as a tangible contribution to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in sustainable consumption and production at the village level. Accordingly, this program has the potential to be replicated as a model for strengthening village-based economies through technology and environmental sustainability.

Keywords: e-commerce, environmental law, consumer protection, sustainable development, SDGs

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam satu dekade terakhir memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sektor ekonomi global, termasuk sektor pertanian. Pemanfaatan e-commerce sebagai media pemasaran telah membuka peluang bagi pelaku usaha di pedesaan untuk memperluas jangkauan pasar, menekan biaya distribusi, serta membangun interaksi langsung dengan konsumen. di Indonesia, tren ini mulai menyentuh usaha-usaha desa, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk pupuk organik yang erat kaitannya isu lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. Desa Melung pernah mengembangkan BUMDes yang bergerak di bidang produksi pupuk kompos sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekaligus dukungan terhadap praktik pertanian ramah lingkungan. sayangnya, kegiatan usaha tersebut tidak lagi berjalan secara optimal karena menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemasaran dan kesiapan dalam legalitas usahanya untuk melindungi dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Padahal, kebutuhan pupuk organik semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan tanah, kualitas pangan, dan urgensi menghadapi krisis lingkungan global. Pengelolaan rantai pasok pangan organik di Indonesia membutuhkan inovasi dari sisi produksi maupun pemasaran agar dapat berkontribusi pada ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan (Relawati et al., 2024).

Pemanfaatan e-commerce sebetulnya dapat menjadi jawaban untuk menghidupkan kembali usaha pupuk kompos di Desa Melung. Namun, peluang ini juga dapat menghadirkan tantangan serius. Pelaku usaha di Desa masih belum banyak yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas formal untuk beroperasi dalam ekosistem perdagangan digital. Meski BUMDes memiliki legalitas administratif dari Pemerintah Desa, tetapi legalitas tersebut belumlah cukup dalam menopang kegiatan pemasaran secara daring. Hal ini berimplikasi langsung pada rendahnya kepercayaan konsumen dan rentannya usaha terhadap permasalahan hukum. Banyak transaksi e-commerce di Indonesia belum berjalan sesuai kerangka perlindungan hukum yang jelas, karena lemahnya implementasi regulasi yang mengatur perizinan dan perlindungan konsumen (Aqidah, 2025).

Aspek hukum lingkungan dan perlindungan konsumen menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Pupuk kompos sebagai produk organik memiliki kaitan langsung dengan kesehatan tanah, keberlanjutan ekosistem dan keamanan pangan. pengelolaannya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi tapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Klaim produk pangan organik di platform digital menemukan adanya potensi penyalahgunaan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

label organik yang dapat merugikan konsumen (Saraswati & Sumarwan, 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan literasi hukum bagi pelaku usaha agar mampu menjalankan praktik pemasaran digital yang jujur, transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masalah berkaitan dengan lemahnya pengawasan, aspek privasi data dan kepercayaan konsumen sering ditemukan dalam transaksi digital. Perlu ditekankan pembelajaran untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce di Indonesia (Subagyono et al., 2025). Pentingnya kebijakan yang komprehensif untuk mendorong praktik pertanian organik melalui insentif dan regulasi, termasuk pemanfaatan platform digital untuk memperluas pasar produk ramah lingkungan (Wijaya, 2025).

Melihat konteks diatas, urgensi kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Melung semakin jelas, pendekatan yang dilakukan bukan hanya bertujuan memperkenalkan digitalisasi pemasaran, tetapi juga memperkuat aspek legalitas dan kesadaran hukum lingkungan bagi pengurus BUMDes dan pelaku usaha lokal. Terdapat integrasi tiga aspek utama yaitu literasi e-commerce, perlindungan konsumen dan hukum lingkungan yang selama ini jarang disentuh secara bersamaan dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya dapat membangkitkan kembali usaha pupuk kompos secara ekonomi, tapi juga beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. digitalisasi rantai pasok pangan di Indonesia apabila didukung dengan inovasi dan regulasi yang tepat, memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu membangun ekonomi desa berbasis teknologi berkelanjutan dan berdaya saing global tanpa meninggalkan aspek sosial dan ekologisnya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan ini diselenggarakan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas pada rentang bulan Juli-September 2025. Potensi usaha pupuk kompos pernah dikelola oleh BUMDes dan menjadi salah satu bentuk inovasi ekonomi Desa. Namun, memiliki hambatan dalam aspek pemasaran sehingga tidak lagi berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan pemahaman baru kepada pengurus BUMDes dan pelaku usaha lokal mengenai pentingnya legalitas usaha, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan e-commerce yang berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan. Peserta terdiri dari pengurus BUMDes serta perwakilan pelaku usaha yang ada di Desa Melung. Metode yang digunakan melalui pendekatan partisipatif dan transformatif, dimana peserta tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tapi juga dilibatkan dalam diskusi kritis dan perumusan strategi keberlanjutan usaha dan legalitasnya. Model ini terbukti efektif dalam program pemberdayaan masyarakat desa karena mampu menumbuhkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan (Harinurdin et al., 2025). Kegiatan dimulai dengan perencanaan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes untuk memetakan kebutuhan, mengidentifikasi permasalahan hukum, serta merancang agenda kegiatan. Sosialisasi legalitas usaha melalui sistem OSS (*One Single Submission*), termasuk penjelasan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

sebagai pintu masuk ke dalam ekosistem perdagangan digital yang resmi untuk dapat masuk dalam ekosistem perdagangan digital yang sah (Rizky et al., 2025). Edukasi hukum lingkungan dan perlindungan konsumen diberikan pengetahuan meliputi regulasi dasar terkait perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce, risiko hukum apabila usaha tidak memiliki legalitas, serta kewajiban untuk menjaga keamanan produk dan kelestarian lingkungan. Diskusi juga diarahkan pada praktik pemasaran pupuk kompos yang sesuai dengan prinsip green economy, dimana aspek profit usaha selalu diseimbangkan dengan tanggung jawab sosial dan ekologis. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui pre-post test sederhana untuk mengukur pemahaman dan observasi keaktifan peserta dilanjutkan dengan diskusi reflektif. Hasilnya, menunjukkan peningkatan pemahaman pada aspek legalitas usaha, perlindungan konsumen, keterkaitan usaha pupuk kompos dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi BUMDes Pupuk Kompos melalui Legalitas E-Commerce

Hasil kegiatan di Desa Melung menunjukkan ada upaya untuk melakukan revitalisasi BUMDes pupuk kompos dengan melandasinya dengan penguatan aspek legalitas usaha dan pemanfaatan e-commerce. Selama ini, BUMDes telah memiliki legalitas dasar dari Pemerintah Desa, namun belum dilengkapi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi prasyarat utama masuk ke ekosistem digital formal. Kondisi ini banyak juga dialami oleh BUMDes lain di Indonesia, dimana kelembagaan usaha desa cenderung lemah dari sisi legalitas dan literasi digital sehingga tidak mampu bersaing di pasar daring (Nurofik et al., 2025).

Sosialisasi mengenai sistem Online Single Submission (untuk selanjutnya disebut OSS) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu fokus utama dari kegiatan ini. Melalui pendampingan, pengurus BUMDes dan pelaku usaha memperoleh pemahaman bahwa legalitas bukan hanya soal administratif saja, melainkan juga kunci kepercayaan konsumen dan akses ke berbagai program pemerintah. Transformasi digital BUMDes memerlukan fondasi kelembagaan yang kuat, dimana legalitas usaha berfungsi sebagai pintu masuk untuk memanfaatkan peluang pemasaran berbasis komunikasi digital (Erwin & Amri, 2024). Peserta mengakui bahwa selama ini masih minim pengetahuan tentang OSS. Setelah mendapatkan penjelasan, peserta menunjukkan komitmen untuk mengurus NIB sebagai langkah awal menghidupkan usahanya.

Kegiatan ini juga menekankan pentingnya memanfaatkan e-commerce sebagai media pemasaran. Para peserta diperkenalkan praktik sederhana pemasaran digital melalui platform marketplace dan media sosial. Strategi pemerintah daerah dalam membangun desa mandiri sangat bergantung pada kemampuan BUMDes mengakses pasar digital (Nicola et al., 2025). Dengan itu, usaha desa tidak hanya bergantung pada pasar lokal, tapi juga dapat menjangkau konsumen lintas wilayah.

Hambatan yang dihadapi BUMDes pupuk kompos terletak pada minimnya strategi pemasaran dan jejaring konsumen. Pengembangan sektor usaha desa, termasuk didalamnya berkaitan dengan pertanian, hanya dapat berhasil apabila didukung oleh inovasi digital marketing (Tricahyono et al., 2023). Melalui dukungan teknologi, produk lokal yang semula hanya dikenal dalam cakupan desa dapat dipromosikan lebih luas, sehingga meningkatkan



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

pendapatan asli desa sekaligus memperkuat posisi BUMDes. Penguatan e-commerce bagi BUMDes tidak hanya berkaitan aspek ekonomi saja, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi digital marketing oleh BUMDes dapat berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Desa (Rifai & Mulyana, 2025).

Revitalisasi BUMDes melalui e-commerce harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Muncul gagasan pengembangan model usaha berbasis kolaborasi antara petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Kewirausahaan desa yang kolaboratif dan partisipatif merupakan kunci keberlanjutan ekonomi pedesaan (Dhewanto et al., 2020). Legalitas dan e-commerce menjadi dua pilar penting dalam revitalisasi usaha pupuk kompos di Desa Melung. Usaha ini tidak hanya dikelola oleh BUMDes, tapi juga melibatkan kelompok tani sebagai produsen sekaligus pengguna utama. Legalitas usaha melalui NIB memberikan kepastian hukum dan akses terhadap dukungan pemerintah dan e-commerce membuka peluang pasar yang lebih luas dan berkelanjutan. Dengan mengkombinasikan kedua hal tersebut, diharapkan dapat menjadi model praktik terbaik bagi BUMDes lain yang menghadapi tantangan yang sama.

Tabel 1. Tahapan Kegiatan

No	Tahapan	Bentuk Pelaksanaan	Capaian Hasil
1	Perencanaan	Koordinasi dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes; identifikasi masalah legalitas dan pemasaran	Terpetakannya kebutuhan peserta, terutama minimnya pemahaman OSS dan NIB
2	Sosialisasi	Penyampaian materi legalitas usaha (OSS, NIB), hukum lingkungan, dan perlindungan konsumen	Peningkatan pengetahuan peserta tentang pentingnya legalitas dan perlindungan konsumen
3	Diskusi Terarah	Diskusi partisipatif bersama pengurus BUMDes dan pelaku usaha mengenai tantangan pemasaran pupuk kompos	Terbentuk strategi awal revitalisasi usaha pupuk kompos berbasis legalitas & e-commerce
4	Evaluasi	Pre-test dan post-test sederhana dan refleksi bersama peserta	Terukur adanya peningkatan pemahaman hukum lingkungan dan literasi e-commerce



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

5	Laporan	Penyusunan laporan pengabdian dan komitmen mengurus NIB serta menjajaki platform digital	Ada kesepakatan mengurus legalitas usaha
---	---------	--	--



Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi

Integrasi Hukum Lingkungan dan Perlindungan Konsumen dalam Usaha Desa

Temuan penting dalam kegiatan ini adalah kesadaran baru peserta mengenai keterkaitan erat antara keberlanjutan usaha desa, hukum lingkungan, dan perlindungan konsumen. Sebelumnya, sebagian pelaku usaha hanya memahami usaha pupuk kompos sebagai kegiatan ekonomi biasa. Namun, setelah diskusi, pengembangan BUMDes tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menjaga lingkungan serta melindungi hak konsumen. Hal ini sejalan dengan konsep green economy yang dipandang sebagai instrumen hukum untuk pemulihan ekonomi sekaligus penguatan perdagangan lintas batas, termasuk e-commerce di Indonesia (Sabirin et al., 2022).

Pupuk kopos dalam konteks hukum lingkungan memiliki peran strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dan menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian. BUMDes dapat berperan sebagai penjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengembangan agribisnis beras organik berbasis pupuk organik (Winarno et al., 2024). Dengan memahami bahwa produk pupuk kompos yang dihasilkan bukan hanya sekadar barang yang diperjualbelikan, tapi juga menjadi solusi terhadap degradasi tanah dan pencemaran akibat residu pupuk kimia.

Kegiatan ini juga menekankan setiap usaha e-commerce wajib menjamin keamanan dan mutu produk sebagai bentuk pengejawantahan dari perlindungan konsumen. Konsumen memiliki hak atas informasi yang jelas dan produk yang sesuai standar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tata kelola BUMDes yang baik haruslah mampu memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus menciptakan praktik ekonomi berkelanjutan, dalam konteks ini sektor pertanian (Andayana et al., 2024). Legalitas melalui NIB dan pemenuhan aspek perlindungan konsumen menjadi prasyarat agar produk pupuk kompos dari Desa Melung dapat diterima secara luas di pasar digital.

Peran BUMDes dalam membangun ekonomi sirkular berbasis komunitas memungkinkan limbah organik rumah tangga dan pertanian dapat diolah kembali menjadi pupuk yang memiliki nilai jual. Dengan begitu mengurangi beban lingkungan dan juga meningkatkan nilai



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

tambah bagi masyarakat Desa. Terlebih, Desa Melung dihadapkan dengan mulai ramainya wisatawan yang berkunjung. Integrasi ekonomi sirkular melalui BUMDes mampu mendorong inovasi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan (Ismail et al., 2025). Pengolahan sampah organik dapat diperkuat melalui tata kelola yang lebih sistematis dan pemasaran digital. Tata kelola dan kompetensi sumber daya manusia juga berpengaruh signifikan. Kompetensi SDM BUMDes dalam mengelola usaha, termasuk dalam hal pencatatan keuangan dan pemasaran melalui e-commerce, merupakan faktor penting dalam menentukan keberlanjutan usaha.

Keterkaitan antara hukum lingkungan, perlindungan konsumen, dan usaha desa diperkuat dengan model bisnis BUMDes menegaskan bahwa keberlanjutan BUMDes bergantung pada kemampuan mengelola usaha secara kolektif, transparan dan ramah lingkungan (Susan Medah & Santosa, 2023). Pada akhirnya, integrasi hukum lingkungan dan perlindungan konsumen dalam usaha desa tidak hanya memperkuat daya saing produk di pasar digital, tetapi juga membangun legitimasi sosial. Dengan pendekatan integrasi ini, usaha pupuk kompos di Desa Melung dapat diposisikan tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai kontribusi nyata desa terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan agenda nasional dan global yang menempatkan konsumsi dan produksi berkelanjutan sebagai salah satu pilar sustainable development goals (SDGs) (DFS Lab, 2022).

KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa revitalisasi BUMDes pupuk kompos membutuhkan sinergi antara penguatan legalitas usaha, pemanfaatan e-commerce, serta integrasi prinsip hukum lingkungan dan perlindungan konsumen. Pelaku usaha desa masih belum memahami pentingnya NIB dan regulasi perlindungan konsumen, sehingga usaha yang dijalankan masih belum memiliki legitimasi formal. Melalui sosialisasi, pendampingan dan diskusi partisipatif, terlihat mulai dipahami bahwa legalitas usaha merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan pasar dan memperoleh akses terhadap dukungan pemerintah. Pemanfaatan e-commerce dipandang sebagai strategi penting untuk memperluas jaringan pemasaran pupuk kompos, sehingga usaha tidak hanya terbatas pada pasar lokal. Pemahaman baru terkait hukum lingkungan dan perlindungan konsumen menegaskan bahwa produk pupuk kompos memiliki peran strategis dalam mendukung pertanian berkelanjutan, menjaga ekosistem, serta melindungi hak-hak konsumen. Integrasi aspek hukum dan lingkungan dalam praktik usaha desa juga memperkuat posisi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berorientasi keberlanjutan. Kegiatan ini diharapkan memiliki kontribusi nyata bagi penguatan kapasitas BUMDes dan pelaku usaha di Desa Melung, khususnya berkaitan dengan menghidupkan kembali usaha pupuk kompos yang terhenti. Tindak lanjut berupa pengurusan NIB, penerapan strategi digital marketing, serta pengembangan standar mutu produk menjadi agenda penting untuk memastikan keberlanjutan usaha sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait konsumsi dan produksi berkelanjutan (Tujuan ke-12).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan kegiatan ini melalui Hibah BLU dengan nomor



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

kontrak 14.30/UN23.34/PM.01/V/2025

DAFTAR PUSTAKA

- Andayana, M. N. D., Holivil, E., Rene, M. O., Kholikin, R. A., & Konslaus, K. (2024). Strengthening Rural Economies: Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) for Agricultural Sustainability in Sikka Regency, Indonesia. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 6(2), 86–100. <https://doi.org/10.55100/administrator.v6i2.86>
- Aqidah, R. N. (2025). The Era of E-Commerce And Consumer Law: A Review of Protection Implementation in Indonesia. *Law and Judicial Review*, 1(1), 11–21. [https://doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1\(1\)-02](https://doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1(1)-02)
- DFS Lab, R. I. and C. D. (2022). *The contribution of platform livelihoods to an inclusive digital economy in Indonesia: Literature review and stakeholder consultations*. DFS Lab, RISE Indonesia and Caribou Digital. <https://www.platformlivelihoods.com/indonesiareview/>
- Dhewanto, W., Ratnaningtyas, S., Permatasari, A., Anggadwita, G., & Prasetyo, E. A. (2020). Rural entrepreneurship: towards collaborative participative models for economic sustainability. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(1), 705–724. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1\(48\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(48))
- Erwin, & Amri. (2024). BUMDes Digital: Revolutionizing Rural Economies Through Marketing Communication. *Jurnal Ekonomi*, 13(4), 70–82. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/5507>
- Harinurdin, E., Laksmono, B. S., Kusumastuti, R., & Safitri, K. A. (2025). Community Empowerment Utilizing Open Innovation as a Sustainable Village-Owned Enterprise Strategy in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 17(8), 3394. <https://doi.org/10.3390/su17083394>
- Ismail, I., Syam, A., H. F., Marhati, M., & MR, S. A. (2025). Community-Based Circular Economy Practices and Social Innovation: A Case Study from Bone Regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiaap.v4i2.6481>
- Nicola, R. N., Muharam, S., & Maryono, M. (2025). Regional Government Strategy in Realizing Independent Village Development in Banjar Regency. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(4). <https://doi.org/10.55324/enrichment.v3i4.456>
- Nurofik, A., Amran, A., Tio, L., Permana, H., & Hendri, N. (2025). TOWARDS BUMDES 4.0: E-COMMERCE-BASED MSME PRODUCT MARKETING ASSISTANCE TRAINING AT BUMDES BALAI BATU SANDARAN VILLAGE, BARANGIN DISTRICT, SAWAHLUNTO CITY. *TOPLAMA*, 2(2), 37–45. <https://doi.org/10.61397/tla.v2i2.321>
- Relawati, R., Milla, A. N., & Nur, M. (2024). Concept of organic foods supply chain management in Indonesia: A review article. *BIO Web of Conferences*, 143, 01016. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414301016>
- Rifai, M. S., & Mulyana. (2025). The Role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Increasing Village Original Income in Munjul Village, Astanajapura District, Cirebon Regency. *International Activa-Passiva Journal*, 2(3), 1058–1069.
- Rizky, P. A., Damayanti, E., Asih, V. G., Sa'diyah, C., Qurratu'aini, N. I., & Gabunia, L. (2025). Assistance in Making NIB for Micro Business UMKM in Gemurung Village. *Jurnal Abdimas Cendekiawan Indonesia*, 2(1), 35–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.56134/jaci.v2i1.116>
- Sabirin, A., Aryaputera Budi, A., Duta Adhiyaksa, F., Putri Aurelya, B., Ridwan, S., Ramadhan Lesmana, J., & Destiro Alifita, F. (2022). Green Economy as a Law for the Economic Recovery Post Covid-19 Amidst the Increasing Cross-border E-commerce in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 25–42. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12072>
- Saraswati, M. A., & Sumarwan, U. (2021). Content Analysis of Organic Food Claims on Websites and



Seminar Nasional LPPM UNSOED 2025

"Pengembangan Sumberdaya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan"

8 Oktober 2025

Purwokerto

- Instagram Stores. *Journal of Consumer Sciences*, 6(2), 151–166. <https://doi.org/10.29244/jcs.6.2.150-164>
- Subagyo, B. S. A., Satory, A., Suheryadi, B., Melissa, M., Yeri, H. N., & Indiaty, K. A. L. (2025). In the Context of Consumer Protection Law, E-Commerce and Its Settlement: Lesson from Indonesia, Malaysia, and European Union. *Journal of Posthumanism*, 5(1), 379–397. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=1358634>
- Susan Medah, J., & Santosa, W. (2023). Business Model Analysis of Joint Village-Owned Enterprises In The Service of The Needs of The Village Community. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(1), 225–245. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i1.729>
- Tricahyono, W., Hidayati, A., Galuh, A., Laela, E., & Widiyahseno, B. (2023). Potential of Bumdes of Wates Village, Jenangan district in the culinary sector. *Jurnal Inovasi Dan Pengembangan Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.61650/jip-dimas.v2i1.207>
- Wijaya, D. (2025). Comparative Policy Frameworks for Promoting Organic Farming and Biodiversity Conservation: Case Studies from Emerging and Developed Economies. *Studies in Knowledge Discovery, Intelligent Systems, and Distributed Analytics*, 15(2), 13–20. <https://edgescholar.com/index.php/SKDISDA/article/view/e-2025-02-07>
- Winarno, J., Wibowo, A., Suwanto, & Permatasari, P. (2024). Role of Stakeholders in the Development of Organic Rice Agribusiness in Karanganyar Regency, Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1364(1), 012031. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1364/1/012031>